



## KAJIAN TEOLOGIS GEREJA DAN POLITIK: Analisis Transformasi Hubungan dan Keterlibatan Kontemporer

Gerli Safira Petonengan<sup>1</sup>  
Fakultas Teologi  
Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[gerli.petonengan@gmail.com](mailto:gerli.petonengan@gmail.com)

Laura Indah Takalamingan<sup>3</sup>  
Fakultas Teologi  
Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[laurakaseti@gmail.com](mailto:laurakaseti@gmail.com)

Alvionita Indasari Taidi<sup>2</sup>  
Fakultas Teologi  
Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[indataidi@gmail.com](mailto:indataidi@gmail.com)

Yuningsi Metusala<sup>4</sup>  
Fakultas Teologi  
Institut Agama Kristen Negeri Manado  
Manado, Indonesia  
[mtslaningsi@gmail.com](mailto:mtslaningsi@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to investigate the evolution of the relationship between church and politics from historical to contemporary times, and how the church can effectively engage in modern politics while adhering to Biblical moral and ethical principles. It provides insights into the historical changes in the church-politics relationship and offers practical guidance for the church's ethical participation in today's political arena. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing observation and literature review techniques to collect data and analyze how the church can contribute to nation-building and social justice. The findings reveal a significant transformation in the church-politics dynamic, from the dominance of the Catholic Church in the Middle Ages, through the separation of church and state in the modern era, to the church's involvement in current global issues. The church often serves as a moral guide but faces challenges in maintaining integrity and avoiding narrow political interests. The study concludes that the church should act as a moral beacon in politics, emphasizing justice and integrity, and actively participate in advancing social welfare in alignment with Biblical principles.*

**Keywords:** Study of Theology, Church and Politics, Political Integrity

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hubungan antara gereja dan politik telah berkembang dari masa lalu hingga sekarang, serta bagaimana gereja dapat terlibat secara efektif dalam politik kontemporer dengan mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika Alkitab. Penelitian ini memberikan wawasan tentang perubahan sejarah dalam hubungan gereja dan politik serta memberikan panduan praktis bagi gereja dalam berpartisipasi secara etis dalam politik saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik observasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data dan menganalisis bagaimana gereja dapat memainkan peran dalam membangun negara dan memajukan keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan gereja dan politik telah berubah drastis, dari dominasi gereja Katolik pada Abad Pertengahan, ke pemisahan gereja dan negara pada era modern, hingga keterlibatan gereja dalam isu-isu global saat ini. Gereja sering berperan sebagai panduan moral, tetapi harus menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan menghindari kepentingan politik sempit. Gereja diharapkan dapat berfungsi sebagai pelita moral dalam politik, menekankan keadilan dan integritas, serta berpartisipasi aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial dengan mengikuti prinsip-prinsip Alkitab.*

**Kata Kunci:** Kajian Teologi, Gereja dan Politik, Integritas Politik

### ARTICLE HISTORY

Submitted: 03-07-2024 | Accepted: 14-08-2024 | Publication: 30-08-2024

© 2024 THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual  
This is an open-access article distributed under the CC BY-NC 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## A. PENDAHULUAN

Gereja dan politik merupakan dua entitas yang saling berhubungan dalam masyarakat, tetapi sering kali terjadi konflik dan ketidaksepakatan antara keduanya. Permasalahan ini dapat dilihat dari sikap apolitis yang diambil oleh beberapa gereja di Indonesia, yang menyebabkan mereka tidak terlibat dalam partisipasi politik dan tidak memainkan peran yang seharusnya dalam membangun negara. Persoalan mengenai peran Gereja dan Politik selalu menjadi perbincangan yang kompleks.

Penyebab utama dari permasalahan ini adalah adanya pandangan yang menganggap bahwa gereja harus terpisah dari urusan politik praktis, karena ada pendapat yang beredar bahwa Gereja adalah institusi suci yang dipandang sebagai tempat untuk menumbuhkan kehidupan rohani dan spiritual yang tidak bisa digabungkan dengan urusan dunia seperti persoalan politik negara.<sup>1</sup> Pandangan ini sering kali didasarkan pada paham pietis dari Kekristenan Barat, yang menekankan pada aspek individual dan pertumbuhan spiritual, sehingga gereja lebih fokus pada ritual-ritual keagamaan daripada tanggung jawabnya kepada negara. Selain itu, adanya kecenderungan partai-partai politik untuk mencari kekuasaan dengan cara apa pun juga mempengaruhi sikap gereja terhadap politik.

Akibat dari sikap apolitis ini adalah gereja tidak dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun negara dan memperjuangkan keadilan sosial. Gereja yang tidak terlibat dalam politik praktis tidak dapat mempengaruhi kebijakan negara dan tidak dapat membela kaum lemah dan miskin. Akibatnya, masyarakat Indonesia, khususnya umat Kristen, cenderung pasif dan apolitis terhadap perpolitikan di Indonesia.

Solusi permasalahan ini bagaimana gereja harus mengambil peran aktif dalam partisipasi politik. Gereja harus memahami tanggung jawabnya kepada negara dan berpartisipasi dalam aktivitas politik sesuai porsi yang sepatutnya. Gereja harus menjadi lembaga yang menyinari dan menerangi kegiatan politik, sehingga negara terbawa kepada tujuan yang benar, sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan cita-cita reformasi. Namun nyatanya eksistensi gereja dalam dunia politik negara tak bisa dipungkiri kalau gereja sering dimanfaatkan dan dikendalikan, menjadikan gereja komoditas politik oleh pihak yang punya kepentingan di dalamnya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini dalam proses pemilihan umum tahun 2024, ada beberapa hal menarik untuk di bahas mengenai gereja dan politik. Melalui observasi yang dilakukan di salah satu gereja di bawah naungan sinode yang ada di Sulawesi utara, cukup menarik ketika ditemukan ada beberapa majelis jemaat lebih condong ke salah satu pihak calon dan keterkaitan yang tidak wajar institusi gereja dengan beberapa pihak yang berkecimpung dalam dunia politik.

---

<sup>1</sup> Daulat Tambunan. "Bolehkah Gereja Berpolitik?" (Jakarta: Binus University, 2021). Akses Online: <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/>. (Akses 23 Juni 2024).

Di masa-masa menjelang pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilihan bupati (pilbub), Gereja yang dilakukan observasi, diberikan tanggung jawab oleh sebuah organisasi olahraga untuk menjadi panitia dalam pelaksanaan Turnamen Sepak Bola kelompok usia 18 tahun, dengan seluruh hasil penjualan tiket akan disumbangkan kepada gereja, yang membuat situasi ini lebih menarik adalah ketua organisasi olahraga tersebut adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau bupati dalam pesta demokrasi yang akan datang. Meskipun hal ini masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan, ini menunjukkan bahwa, di masa-masa menjelang pesta demokrasi pilgub dan pilbub ada beberapa pihak yang mulai memberikan perhatian khusus kepada gereja, termasuk dengan memberikan dukungan finansial yang signifikan. Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan tentang motivasi di balik dukungan tersebut dan bagaimana hal ini mempengaruhi dinamika hubungan antara gereja dan politik.

Melalui tulisan ini, hal yang akan dikaji, apakah gereja boleh berpolitik dan bagaimana seharusnya gereja berperan dalam dunia politik negara, juga untuk menganalisis bagaimana gereja berinteraksi dengan politik dan bagaimana hal ini mempengaruhi misi atau tugas gereja. Sehingga melalui tulisan ini bagaimana seharusnya gereja dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat, gereja dapat memperjuangkan keadilan sosial, membela kaum lemah maupun kaum miskin, gereja juga dapat menjadi pengaruh yang positif dalam membangun negara dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Tulisan-tulisan mengenai hubungan politik dan gereja mencakup beberapa aspek penting: Pertama. "Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja". Penelitian ini menyoroti praktik politik di dalam gereja dan bagaimana gereja dapat melakukan transformasi politik secara positif, kritis, kreatif, dan realistis. Gereja dianggap sebagai garam dan terang dunia yang dapat melakukan perubahan politik melalui iman Kristiani.<sup>2</sup> Kedua. "TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN: Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas". Penelitian ini mengangkat pergumulan gereja dalam menghadapi politik identitas yang menguat di Indonesia. Gereja dianggap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial dan perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup> Ketiga. "Kajian Teologi Politik terhadap Pemahaman dan Partisipasi Politik Warga Jemaat GKPI Bekasi dalam Perpolitikan di Indonesia". Penelitian ini menyoroti bagaimana gereja dapat mengambil peran dalam partisipasi politik dan memahami tanggung jawabnya kepada negara.

---

<sup>2</sup> Adi Putra, et al. "Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja". *Saint Paul's Review*. Vol 3. No. 1, Juni 2023, hh. 78-92.

<sup>3</sup> Djoys A. Rantung. "TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas". *Voic of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*. Vol. 2 No. 1. 2018, hh. 58-73.

Gereja dianggap sebagai lembaga yang selayaknya dapat berpartisipasi dalam politik dan mempengaruhi kebijakan negara.<sup>4</sup>

Gap pengetahuan dari penelitian sebelumnya adalah kurangnya pemahaman tentang bagaimana gereja dapat terlibat dalam politik praktis tanpa mengorbankan nilai keagamaan dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara gereja di Sulawesi Utara dapat berpartisipasi dalam politik sambil tetap menjaga nilai-nilai tersebut. Metode yang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mengumpulkan data dan menganalisis peran aktif gereja dalam pembangunan negara dan keadilan sosial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik kombinasi antara observasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data dan menganalisis bagaimana gereja dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membangun negara dan memperjuangkan keadilan sosial. Peneliti melakukan penelitian di salah satu gereja yang ada di Sulawesi Utara dan menemukan fenomena yang sudah diuraikan dalam latar belakang tulisan ini, melalui observasi dan turun langsung ke tempat penelitian. Sementara itu untuk studi literatur peneliti gunakan untuk mencari informasi mengenai kaitan antara gereja dan politik, dan menggunakan literatur-literatur yang ada untuk dijadikan bahan perbandingan dengan keadaan gereja yang ada sekarang ini. Kombinasi antara observasi dan studi literatur ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Observasi memberikan data empiris yang konkret, sementara studi literatur menyediakan kerangka teoritis yang memperkaya analisis, dengan menggabungkan kedua proses pengumpulan data, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan peran gereja dalam politik secara lebih lengkap dan mendetail, serta untuk memahami motivasi dan dampak dari keterlibatan gereja dalam arena politik.

## **C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peningkatan Kualitas Spiritual, Keterlibatan Sosial, dan Strategi Gereja**

Kata “gereja” berasal dari kata Yunani “*ekklesia*” (ἐκκλησία), yang berasal dari kata kerja “*ekkaleo*” (ἐκκαλέω). “*Ekklesia*” terdiri dari dua bagian: “*ek*” (ἐκ), yang berarti “keluar dari,” dan “*kaleo*” (καλέω), yang berarti “memanggil.” Secara harfiah, “*ekklesia*” berarti “memanggil keluar.”<sup>5</sup> Millard J.

---

<sup>4</sup> Mitra Agustina. “*Kajian Teologi Politik terhadap Pemahaman dan Partisipasi Politik Warga Jemaat GKPI Bekasi dalam Perpolitikan di Indonesia*”. Repositori Skripsi Fakultas Teologi UKSW, (Salatiga: UKSW, 2020). Akses Online: [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20892/2/T1\\_712014114\\_Full%20text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20892/2/T1_712014114_Full%20text.pdf). (Akses, 6 July 2024).

<sup>5</sup> G. C. Van Niftrik dan B.J. Boland. “*Dogmatika Masa Kini*”. (Jakarta: PT BPK, 2000), h. 360-361.

Erickson, seperti dikutip oleh Situmorang, menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Baru, istilah “*ekklesia*” digunakan dengan latar belakang bahasa Yunani klasik. Di Yunani klasik, sejak abad ke-5 SM, “*ekklesia*” merujuk pada perkumpulan warga kota yang berkumpul pada waktu tertentu, seperti di Athena, hingga tiga puluh atau empat puluh kali setahun. Meskipun kekuasaannya terbatas, semua anggota memiliki hak suara. Secara sekuler, istilah ini digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang berkumpul, seperti yang terlihat dalam Kisah Para Rasul 19:32, 39, dan 40. Hanya dalam beberapa kasus, “*ekklesia*” digunakan untuk merujuk pada pertemuan keagamaan, dan bahkan dalam konteks tersebut, lebih sering merujuk pada pertemuan bisnis anggota kelompok keagamaan, bukan kelompok itu sendiri.<sup>6</sup>

Gereja juga memiliki makna dalam bahasa Ibrani, yaitu “*qahal*,” dalam perjanjian lama yang berarti perkumpulan atau sejumlah orang yang berhimpun. John F. Walvoord, seperti dijelaskan dalam Situmorang, menyebutkan bahwa ketika “*qahal*” diterjemahkan menjadi “*ekklesia*,” istilah ini merujuk pada suatu perkumpulan fisik atau pertemuan di satu tempat, dan tidak digunakan untuk menggambarkan kumpulan rohani orang-orang suci.<sup>7</sup> Para penerjemah Septuaginta menggunakan kata Yunani “*ekklesia*” untuk menerjemahkan kata Ibrani “*qahal*,” yang dalam Perjanjian Lama merujuk pada “jemaat” atau komunitas Israel, khususnya dalam konteks keagamaan sebagai umat Allah. Dalam Injil Matius 16:18, Yesus pertama kali menggunakan istilah “*ekklesia*” untuk orang Kristen dalam perkataan-Nya kepada Petrus di Kaisarea Filipi: “Aku akan mendirikan jemaat-Ku.”<sup>8</sup>

Dalam konteks Alkitab, gereja merujuk pada kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Istilah ini menggambarkan orang-orang percaya yang dipanggil dan dikumpulkan oleh Yesus Kristus untuk menyembah Tuhan. Berdasarkan pengertian ini, gereja dapat disimpulkan sebagai: a. Gedung atau tempat ibadah umat Kristen: Fisik lokasi di mana umat Kristen berkumpul untuk beribadah, b. Setiap orang percaya: Individu yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah, c. Persekutuan orang percaya: Komunitas yang memberitakan kabar baik dan berbagi iman, d. Komunitas yang Saling Menolong: Tempat di mana anggotanya saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, dan d. Tubuh Kristus: Menggambarkan gereja sebagai komunitas di mana Kristus adalah Kepala.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, gereja adalah tempat ibadah umat Kristen. Dalam bahasa Inggris, istilah “church” berasal dari kata Yunani “*kuriakon*” atau “*kuriakos*,” yang berarti “milik Tuhan.” Orang Kristen Yunani menggunakan istilah ini untuk menyebut tempat ibadah, dan istilah ini muncul dalam

---

<sup>6</sup> Jonar T. H. Situmorang. “*Sejarah Gereja Umum*”. (Yogyakarta: Penerbit Andy, 2014), h. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>8</sup> Kejar Hidup Laia. “Pertumbuhan Gereja Dan Penginjilan Di Kepulauan Nias”. *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*. Vol. 2. No. 2, 2019, h. 289.

<sup>9</sup> Jonar T. H. Situmorang. “*Sejarah Gereja Umum*”, h. 8.

Perjanjian Baru, seperti di 1 Korintus 11:20 dan Wahyu 1:10. Selain merujuk pada tempat, “*church*” juga mencakup berbagai aspek terkait orang percaya, seperti: a. Organisasi Lokal: Gereja setempat di suatu daerah, b. Komunitas Global: Kumpulan umat Kristen di seluruh dunia, c. Denominasi Tertentu: Seperti Lutheran, Calvinis, Pentakosta, dan d. Organisasi Berbasis Wilayah atau Bangsa: Kelompok gereja yang berhubungan dengan wilayah atau bangsa tertentu.<sup>10</sup>

Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari dua aspek: kualitas dan kuantitas. Secara Kualitas: Pertumbuhan gereja terlihat dari peningkatan kerohanian dan kedewasaan spiritual anggota jemaat. Ini mencakup penguatan iman, peningkatan pemahaman ajaran agama, dan penerapan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Secara Kuantitas: Pertumbuhan juga diukur dari bertambahnya jumlah anggota gereja. Ini mencerminkan ekspansi dan penjangkauan gereja kepada lebih banyak orang. Gereja yang sehat biasanya memulai dengan pertumbuhan kualitas yang kuat, yang kemudian mendorong pertumbuhan kuantitas. Dengan kata lain, gereja yang mendalami dan memperkuat iman anggotanya cenderung akan menarik lebih banyak orang untuk bergabung.<sup>11</sup>

Gereja yang ingin mencapai pertumbuhan sehat mencakup beberapa langkah kunci yang harus diimplementasikan berdasarkan literatur yang telah dibahas. Pertama, gereja harus fokus pada peningkatan kualitas rohani anggotanya. Hal ini bisa dicapai melalui program-program pembinaan yang mendalam, seperti studi Alkitab secara teratur, kelompok doa, dan pelatihan kepemimpinan yang berorientasi pada pengembangan karakter Kristen. Kualitas spiritual gereja sangat penting dalam membangun fondasi yang kokoh. Gereja yang mendalami iman dan meningkatkan kualitas spiritual anggotanya akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memperluas pengaruhnya. Kedua, gereja harus memanfaatkan peluang untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat yang relevan. Ini termasuk mengadakan program pengabdian masyarakat, mendukung keadilan sosial, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana dibahas dalam “*TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN,*” gereja memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial. Keterlibatan aktif dalam masalah sosial tidak hanya memperkuat hubungan dengan komunitas lokal tetapi juga menunjukkan komitmen gereja terhadap prinsip-prinsip Kristen dalam praktik sehari-hari.

Ketiga, untuk mencapai pertumbuhan kuantitas, gereja harus fokus pada evangelisasi dan penjangkauan. Gereja perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk menarik orang baru, seperti program pengenalan bagi pengunjung baru, serta memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 3-4.

<sup>11</sup> Kejar Hidup Laia. “Pertumbuhan Gereja Dan Penginjilan Di Kepulauan Nias”. *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*. Vol. 2. No. 2, 2019, h. 288.

memperluas jangkauan. Sebagaimana dikemukakan dalam literatur yang ada, pertumbuhan kuantitas seringkali mengikuti pertumbuhan kualitas; oleh karena itu, strategi evangelisasi harus dipadukan dengan upaya-upaya peningkatan spiritual yang telah dilakukan. Dengan menggabungkan pertumbuhan kualitas dan kuantitas secara sinergis, gereja dapat menjadi komunitas yang sehat dan berdampak secara signifikan.

## 2. Pandangan Alkitab tentang Peran Gereja dan Keterlibatan dalam dunia Politik.

Politik berasal dari kata "*politic*" dalam bahasa Inggris, yang berarti bijaksana atau tindakan yang dipertimbangkan dengan matang. Kata ini berakar dari bahasa Latin "*politicus*" dan Yunani "*politikos*," yang berarti berkaitan dengan warga negara dan "*polis*," yang artinya kota dalam bahasa Yunani. Ini menunjukkan bahwa politik terkait erat dengan urusan masyarakat yang terorganisir. Di Indonesia, istilah politik memiliki beberapa makna, seperti kebijaksanaan, strategi, hubungan antar negara, dan juga disiplin ilmu yang mempelajari sistem pemerintahan dan kebijakan publik. Jadi, politik tidak hanya mencakup tindakan politis atau kebijakan pemerintah, tetapi juga meliputi strategi, diplomasi, dan pengetahuan tentang urusan publik.<sup>12</sup> Menurut Andrew Hailwood, seperti yang dikutip oleh Budiardjo, politik adalah aktivitas suatu bangsa dalam membuat, mempertahankan, dan mengubah aturan yang mengatur kehidupan mereka. Ini melibatkan konflik dan kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Menurut Aristoteles, seperti dijelaskan dalam Ahmad, politik terjadi ketika warga negara berkumpul untuk membahas atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan bersama. Manusia dianggap sebagai makhluk politik karena mereka hidup dalam masyarakat atau negara, yang disebut sebagai polis.<sup>14</sup>

Secara umum, politik adalah proses pembuatan, penerapan, dan penyesuaian kebijakan publik yang mengatur kehidupan di suatu negara atau komunitas. Ini melibatkan interaksi antara berbagai kelompok dan individu dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda. Politik juga mencakup pengaturan sumber daya, distribusi kekuasaan, dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, politik tidak hanya tentang pembuatan keputusan atau pemerintahan, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan komunitas atau negara.

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Nambo dan Muhamad Rusdiyanti Puluhuluwa. "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)". *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. Vol. 21. No. 2, 2005, hh. 262–285.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo. "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hh. 15-16.

<sup>14</sup> Ahmad Sholikin. "*Hand Out Teori-Teori Politik*". (Lamongan: UIDU, 2018), h. 2. Akses Online: <https://osf.io/preprints/osf/mveb6>. (Akses, 8 July 2024).

Alkitab tidak memberikan petunjuk langsung tentang cara menjalankan politik dengan aturan atau kebijakan tertentu. Namun, Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang bisa diterapkan dalam politik. Nilai-nilai seperti keadilan, kasih, dan integritas menjadi panduan bagi orang Kristen dalam berpolitik. Kisah-kisah dan nasihat dalam Alkitab menekankan pentingnya kejujuran, melayani sesama, dan menghormati otoritas publik. Walaupun Alkitab tidak menawarkan sistem politik yang rinci, prinsip-prinsip ini membantu orang percaya membuat keputusan politik yang bijaksana dan etis serta berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>15</sup>

Menurut pandangan Alkitabiah, politik merupakan cara yang Tuhan tentukan untuk mengatur masyarakat dan menjaga ketertiban. Allah menciptakan otoritas dan pemerintahan untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Alkitab mengajarkan bahwa semua otoritas berasal dari Allah dan pemerintah bertindak sebagai pelayan-Nya untuk kebaikan bersama. Dalam Roma 13:1-2, dinyatakan bahwa *“Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.”* Pemerintah yang adil dan benar memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Pemerintah yang diberkati oleh Allah diharapkan menjalankan tugasnya dengan adil dan menciptakan ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera. Bagi orang Kristen, terlibat dalam politik bukanlah untuk mengejar kekuasaan pribadi, tetapi untuk menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan publik. Orang Kristen dipanggil untuk berpartisipasi dalam politik dengan integritas, keadilan, dan kasih. Mereka harus mencerminkan keadilan ilahi dan bekerja untuk kebenaran serta kedamaian dalam masyarakat. Dengan demikian, peran Kristen dalam politik adalah untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan keadilan, kasih, dan kedamaian yang Allah inginkan bagi umat manusia.

Orang Kristen perlu terlibat dalam pendidikan politik melalui gereja dan lembaga pendidikan lainnya. Dalam konteks Alkitab, gereja memiliki tanggung jawab penting dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip Alkitabiah seperti keadilan, kasih, dan integritas. Praktik yang pertama adalah mendidik jemaat tentang peran mereka dalam politik berdasarkan ajaran Alkitab.<sup>16</sup> Gereja harus menyampaikan nilai-nilai ini melalui khotbah, studi Alkitab, dan pelatihan, memastikan bahwa anggota jemaat memahami pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan pendidikan yang baik, jemaat diharapkan dapat terlibat dalam proses politik secara etis, memilih pemimpin dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi seperti pemilihan umum. Politik menurut Alkitab adalah upaya sadar

---

<sup>15</sup> Ferdinan Samuel Manafe. “SIKAP KRISTEN DALAM ARENA POLITIK”. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 6. No. 1, 2017, hh. 1-2.

<sup>16</sup> Djoys Anake Rantung. “Pendidikan Agama Kristen Dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia”. *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 1. No. 2, 2017, hh. 61-62.

untuk memahami dan memaknai realitas politik dengan pandangan Alkitab. Orang Kristen yang terlibat dalam politik harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan yang baik, dan menjauhi dosa. Mereka harus mengedepankan prinsip Alkitab dalam setiap keputusan politik untuk memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan.<sup>17</sup>

Selain itu, gereja harus berfungsi sebagai pengawas sosial yang mengawasi dan menilai kebijakan serta tindakan pemerintah dengan pandangan Alkitabiah. Ini berarti gereja perlu berani menegur ketidakadilan dan ketidakbenaran dalam pemerintahan, mirip dengan peran nabi-nabi dalam Alkitab. Gereja dapat melakukan ini dengan cara menyuarakan isu-isu penting melalui forum publik, menulis artikel, atau menyampaikan pendapat kepada pengambil keputusan. Dengan berperan aktif dalam mengawasi pemerintah, gereja membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kasih yang ditekankan dalam Alkitab.

Dalam pandangan Alkitab, pemerintah dianggap sebagai institusi yang ditetapkan oleh Tuhan, seperti dijelaskan dalam Roma 13:1-7 dan 1 Petrus 2:13-17. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan ketertiban, dan orang percaya disarankan untuk patuh pada otoritas pemerintahan selama tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa keadilan dan kebenaran dalam pemerintahan sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat, seperti terlihat dalam Amsal 29:2 dan Mikha 6:8. Orang Kristen diharapkan terlibat dalam politik dengan tetap memegang teguh iman dan integritas mereka, seperti dicontohkan oleh Daniel dan Yusuf. Mereka memiliki kewarganegaraan ganda—di Kerajaan Surga dan dunia—yang dijelaskan dalam Filipi 3:20 dan Yohanes 17:14-16, menunjukkan bahwa meskipun hidup di dunia, nilai-nilai mereka harus tetap sesuai dengan prinsip surgawi.

Gereja juga dapat terlibat langsung dalam program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kegiatan ini, gereja tidak hanya menunjukkan pelayanan dan pengabdian yang tulus, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kondisi sosial yang lebih luas. Ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan pelayanan kepada sesama dan pembuatan kebijakan yang mendukung kesejahteraan umum. Dengan berpartisipasi dalam proyek sosial dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah serta organisasi lain, gereja dapat memperkuat perannya dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera, serta mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam setiap aspek kehidupan publik.

Orang Kristen yang terlibat dalam politik seharusnya menjadi contoh dalam hal integritas, keadilan, dan kebenaran. Mereka perlu mendapatkan dukungan dan doa dari gereja agar bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip Alkitab. Adolf Bastian Simamora mendorong

---

<sup>17</sup> Saur Meilianti. "Pendidikan Kristiani dalam Membentuk Kesadaran Politik: Upaya Mendorong Partisipasi Politik dalam Prinsip Etis Teologis". *SIKIP Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. Vol.3. No. 2, 2022, hh. 143-144.

gereja dan orang percaya di Indonesia untuk serius memperhatikan politik dan melakukannya berdasarkan ajaran Alkitab. Dengan begitu, gereja bisa berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang adil dan benar serta membantu jemaat memahami tanggung jawab politik mereka.<sup>18</sup>

### 3. Sejarah Politik dan Gereja

Sejarah keterlibatan gereja dalam politik dimulai pada zaman Kekaisaran Romawi dengan Gereja Katolik Roma. Pada tahun 313 M, Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milano, yang menjadikan Kekristenan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi.<sup>19</sup> Langkah ini memberi gereja pengakuan politik dan perlindungan setelah periode penganiayaan, memungkinkan gereja untuk berkembang dan memperluas pengaruhnya. Selain itu, Konstantinus berperan dalam Konsili Nicea pada tahun 325 M, yang membantu membentuk struktur gereja dan memperkuat hubungannya dengan negara dan masyarakat. Sejak saat itu, gereja tidak hanya berfungsi sebagai entitas spiritual tetapi juga menjadi kekuatan politik yang signifikan.<sup>20</sup>

Pada periode berikutnya, para uskup dan pemimpin gereja mulai terlibat lebih aktif dalam administrasi negara, sering menjadi penasihat bagi kaisar dan memegang posisi pemerintahan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, gereja tetap menjadi institusi yang stabil dan terorganisir. Paus dan pejabat gereja lainnya mulai memainkan peran penting dalam politik Eropa, mempengaruhi penguasa sekuler dan mengatur kekuasaan gerejawi yang melintasi batas negara. Konflik dan kolaborasi antara gereja dan negara selama Abad Pertengahan, seperti Investitur Kontroversi dan Perang Salib, menunjukkan interaksi dan benturan antara otoritas spiritual dan temporal. Hingga zaman modern, keterlibatan gereja dalam politik terus mempengaruhi sejarah politik dan sosial di Eropa dan dunia, dengan banyak negara Eropa memiliki hubungan historis yang erat antara kekuasaan gerejawi dan sekuler. Sejarah politik gereja telah membentuk perkembangan internal gereja serta berperan signifikan dalam jalannya sejarah politik global.<sup>21</sup>

Pada Abad Pertengahan, Paus sering memiliki kekuasaan yang sangat besar, bahkan melebihi kekuasaan raja dan kaisar, menciptakan situasi politik yang rumit di Eropa. Salah satu contoh terkenal dari konflik antara kekuasaan gerejawi dan duniawi adalah Kontroversi Penobatan pada abad ke-11, yang melibatkan Paus Gregorius VII dan Kaisar Henry IV. Konflik ini berpusat pada hak

---

<sup>18</sup> Adolf Bastian Simamora. "Politik Menurut Alkitab dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik di Indonesia". *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah dan Musik Agama*. Vol. 2. No. 1, 2018.

<sup>19</sup> Frederiek Djara Wellem. "Kamus Sejarah Gereja". (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), h. 88.

<sup>20</sup> Mikael Eskelner. "Kekristianan di Periode Ante-Nicene, Bapa Gereja, dan Penganiayaan terhadap Orang Kristen", terj. Budi Hidayat. (Cambridge: Cambridge Press, 2021), h. 5-6.

<sup>21</sup> Peter Brown. "The Rise of Western Christendom". (Hoboken: Wiley-Blackwell, 2013), h. 73-75.

untuk menunjuk pejabat gerejawi seperti uskup dan kepala biara, sebuah hak yang dikenal sebagai investitur. Paus Gregorius VII berusaha untuk memisahkan kekuasaan gerejawi dari kekuasaan duniawi, mengklaim bahwa hanya gereja yang berhak mengangkat pejabat gerejawi tanpa campur tangan dari penguasa sekuler. Dalam dokumen "Dictatus Papae" pada tahun 1075, Gregorius VII menegaskan supremasi kepausan, termasuk hak untuk mencopot kaisar dari jabatannya. Kaisar Henry IV, yang sangat bergantung pada kontrol atas penunjukan pejabat gerejawi untuk mempertahankan kekuasaan politiknya, menolak keputusan ini. Ketegangan memuncak ketika Henry IV tidak mematuhi keputusan paus dan kemudian diekskomunikasi oleh Gregorius VII pada tahun 1076. Ekskomunikasi ini menyebabkan krisis besar karena Henry IV kehilangan dukungan politik dan religius dari bangsawan dan rakyatnya. Untuk memperbaiki posisinya, Henry IV melakukan perjalanan ke Kastil Canossa pada tahun 1077 dan, dalam sebuah tindakan dramatis, berdiri sebagai orang berdosa di depan Paus Gregorius VII selama tiga hari sebelum akhirnya diterima kembali ke dalam gereja. Meskipun Henry IV mendapatkan pengampunan, konflik antara kekuasaan spiritual dan temporal terus berlanjut sepanjang Abad Pertengahan, mencerminkan perjuangan panjang dan kompleks antara gereja dan negara dalam sejarah Eropa.<sup>22</sup>

Pada abad ke-16, Masa Reformasi menjadi momen penting dalam sejarah Eropa karena gereja Katolik menghadapi tantangan besar dari reformis seperti Martin Luther. Luther mengkritik praktik korup dalam gereja, terutama penjualan indulgensi, dan protesnya memicu gerakan Reformasi yang menyebabkan perpecahan besar dalam Kekristenan. Kritik Luther menyebar luas di Eropa, yang bukan hanya menghasilkan berbagai denominasi Protestan tetapi juga mengurangi kekuasaan gereja Katolik dalam urusan spiritual dan politik. Ini membuka jalan bagi munculnya kebebasan beragama dan memperkuat peran negara sekuler. Reformasi mengubah secara mendalam struktur sosial, politik, dan keagamaan di Eropa, menandai awal era baru dalam sejarah Barat.<sup>23</sup>

Selama berabad-abad, hubungan antara gereja dan politik telah mengalami banyak perubahan, tetapi gereja tetap berperan penting di kancah politik global. Awalnya, agama Kristen di Kekaisaran Romawi berkembang meski dianiaya, hingga Kaisar Konstantinus mengakui Kristen sebagai agama resmi pada abad ke-4, yang mempererat hubungan gereja dengan negara. Di Abad Pertengahan, Gereja Katolik Roma sangat berpengaruh, dengan Paus memainkan peran besar dalam politik dan penunjukan raja. Reformasi Protestan abad ke-16 memecah Kekristenan Eropa dan mengubah hubungan antara gereja dan negara, dengan beberapa negara menjadi Protestan dan yang lain tetap Katolik. Perjanjian Westphalia tahun 1648 mengurangi pengaruh gereja dalam

---

<sup>22</sup> Colin Morris. *The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250*. (Oxford: Clarendon Press, 1989), hh.126-127.

<sup>23</sup> Diarmaid MacCulloch. *The Reformation: A History*. (New York: Penguin Books, 2003), h. 205.

politik internasional, menekankan kedaulatan negara dan menguatkan konsep negara sekuler. Revolusi Amerika dan Prancis memperkenalkan ide-ide tentang kebebasan individu dan pemisahan gereja dari negara, yang tercermin dalam konstitusi Amerika Serikat. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak negara mengalami proses sekularisasi, meski di beberapa tempat hubungan antara agama dan negara tetap kuat. Di era kontemporer, Gereja Katolik dan Paus terus terlibat dalam isu global seperti hak asasi manusia dan perdamaian. Namun, di beberapa wilayah, pengaruh agama dalam politik tetap kuat. Di Amerika Serikat, kelompok evangelis memiliki pengaruh besar, sementara di Timur Tengah, politik sering kali terkait erat dengan agama. Di Polandia, Gereja Katolik berperan dalam melawan komunisme, dan di Amerika Latin, Gereja aktif dalam advokasi sosial melalui Teologi Pembebasan. Di India, agama Hindu mempengaruhi kebijakan melalui partai seperti BJP. Meski banyak negara menuju sekularisasi, gereja dan institusi keagamaan tetap berpengaruh dalam politik global, baik dalam hal spiritual maupun advokasi sosial dan kemanusiaan.<sup>24</sup>

Sejarah hubungan antara gereja Protestan dan politik seperti perjalanan panjang yang penuh tantangan. Awalnya, fokus gereja Protestan adalah pada keselamatan individu dan komunitas. Namun, perjalanan ini menjadi sangat rumit dengan adanya Reformasi Protestan dan berbagai peristiwa besar dalam sejarah dunia, seperti masa kolonialisme, Perang Dunia, dan periode setelah Perang Dingin, yang membawa perubahan besar. Selama berabad-abad, peran gereja dalam politik telah berubah, mulai dari terlibat langsung dalam pemerintahan hingga menjadi lebih moderat dan terpisah. Saat ini, tidak ada satu jawaban yang pasti tentang peran gereja Protestan dalam politik. Beberapa gereja aktif dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan perubahan politik, sementara yang lain lebih memilih fokus pada aspek spiritual dan menghindari keterlibatan politik.<sup>25</sup> Contoh keterlibatan gereja Protestan, seperti gerakan hak sipil di Amerika dan perlawanan terhadap apartheid di Afrika Selatan, menunjukkan kontribusi mereka dalam sejarah.<sup>26</sup> Kini, isu-isu seperti kemiskinan, hak asasi manusia, dan perubahan iklim juga menjadi perhatian gereja Protestan di seluruh dunia. Perlu diingat bahwa gereja Protestan sangat beragam dalam pandangan politiknya. Setiap gereja memiliki kebebasan untuk menentukan peran dan kontribusinya dalam masyarakat. Perdebatan mengenai peran politik gereja Protestan kemungkinan akan terus berlanjut, mencerminkan dinamika dan kompleksitas hubungan antara gereja dan politik.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Adrian Hastings, (ed.). "A World History of Christianity". (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2000), h. 320.

<sup>25</sup> Neni Gusti Endang Farasi, Manahan Zulkifli Nainggolan, dan Ribka Sijabat. "Peran Agama Kristen dalam Hubungan Internasional". *Global Political Studies Journal*. Vol. 7. No. 2, 2023, h. 171.

<sup>26</sup> Agus Budiman. "Politik Apartheid di Afrika Selatan". (Unigal Repository: Jurnal Artefak, 2013), h. 19.

<sup>27</sup> Neni Gusti Endang Farasi, Manahan Zulkifli Nainggolan, dan Ribka Sijabat. "Peran Agama Kristen dalam Hubungan Internasional". *Global Political Studies Journal*. Vol. 7. No. 2, 2023, hh. 171-173.

Gereja, sebagai penerang dunia, diharapkan untuk memberikan arahan dalam politik dan menggunakan hak politiknya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan partai atau kekuasaan pribadi. Sebagai suara moral, gereja harus menegaskan perannya dalam memperkenalkan nilai-nilai etika dalam politik.<sup>28</sup> Politik seharusnya menuju ke arah yang lebih baik dengan integritas. Pemilihan pemimpin tidak hanya harus didasarkan pada keuntungan pribadi atau politik transaksional, tetapi harus memilih pemimpin yang berdedikasi, berintegritas, dan memiliki tujuan untuk melayani dan memajukan negara. Orang percaya harus memahami peran mereka sebagai warga negara, termasuk terlibat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara, serta aktif dalam ranah politik.<sup>29</sup>

Gereja harus secara aktif terlibat dalam politik dengan pendekatan yang etis dan berbasis pada prinsip-prinsip moral Alkitab, sambil menghindari terjebak dalam kepentingan politik atau kekuasaan sempit. Berdasarkan sejarah, seperti keterlibatan gereja dalam konflik antara kekuasaan gerejawi dan sekuler di Abad Pertengahan, serta pengaruh gereja dalam Reformasi dan gerakan sosial seperti hak-hak sipil, gereja memiliki tanggung jawab untuk menerangi isu-isu politik dengan nilai-nilai keadilan, integritas, dan pelayanan. Dalam konteks modern, gereja seharusnya mendidik jemaat tentang tanggung jawab politik mereka, mendorong partisipasi aktif dalam pemilu dengan memilih pemimpin yang adil dan melayani kepentingan umum, serta berperan sebagai suara moral yang menegur ketidakadilan dan mendukung kebijakan yang memajukan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Sejarah hubungan antara gereja dan politik menunjukkan pergeseran signifikan dari kekuasaan dominan gereja Katolik di Abad Pertengahan, melalui tantangan Reformasi Protestan yang mengurangi otoritas gereja, hingga era modern di mana gereja memainkan peran penting namun beragam dalam politik global. Mulai dari pengakuan Kristen sebagai agama resmi pada zaman Kekaisaran Romawi hingga sekularisasi dan pemisahan gereja dan negara yang ditetapkan oleh revolusi modern, gereja terus beradaptasi dan berkontribusi secara signifikan dalam isu-isu sosial dan politik. Dalam konteks kontemporer, gereja diharapkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Alkitab dalam partisipasinya di arena politik, mendidik jemaat tentang tanggung jawab politik, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan tanpa terjebak dalam kepentingan politik sempit.

---

<sup>28</sup> Adolf Bastian Simamora. "Politik Menurut Alkitab dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik di Indonesia". *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*. Vol. 2. No. 1, 2018.

<sup>29</sup> Y. A. Arifianto. "Melawan Money Politics Dalam Elektoral: Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja". *Khamisyim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 1. No. 1, 2023, h. 6.

## E. REFERENSI

- Agustina, M. (2020). *"Kajian Teologi Politik terhadap Pemahaman dan Partisipasi Politik Warga Jemaat GKPI Bekasi dalam Perpolitikan di Indonesia"*. Repositori Skripsi Fakultas Teologi UKSW, Salatiga: UKSW.
- Arifianto, Y. A. (2023). "Melawan Money Politics Dalam Elektoral: Upaya Mereduksi Kejahatan Politik Masuk Gereja". *Khamisyim: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*. Vol.1. No. 1, hh. 1-14.
- Brown, P. (2013). *"The Rise of Western Christendom"*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Budiardjo M. (2008). *"Dasar-Dasar Ilmu Politik"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (2013). *"Politik Apartheid di Afrika Selatan"*. Unigal Repository: Jurnal Artefak.
- Eskelner, M. (2021). *"Kekristianan di Periode Ante-Nicene, Bapa Gereja, dan Penganiayaan terhadap Orang Kristen"* terj. Budi Hidayat. Cambridge: Cambridge Press.
- Farasi, N. G. E., Nainggolan, M. Z., & Sijabat, R. (2023). "Peran Agama Kristen dalam Hubungan Internasional". *Global Political Studies Journal*. Vol. 7. No. 2, hh. 170-179.
- Hastings, A. (ed). (2000). *"A World History of Christianity"*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Laia, K. H. (2019). "Pertumbuhan Gereja Dan Penginjilan Di Kepulauan Nias". *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*. Vol. 2. No. 2, hh. 286-302.
- Manafe, F. S. (2017). "SIKAP KRISTEN DALAM ARENA POLITIK". *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 6. No. 1, hh. 1-16.
- MacCulloch, D. (2003). *"The Reformation: A History"*. New York: Penguin Books.
- Meilianti, S. (2022). "Pendidikan Kristiani dalam Membentuk Kesadaran Politik: Upaya Mendorong Partisipasi Politik dalam Prinsip Etis Teologis". *SIKIP Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 3. No. 2, hh. 139-147.
- Morris, C. (1989). *"The Papal Monarchy: The Western Church from 1050 to 1250"*. Oxford: Clarendon Press.
- Nambo, A. B., & Puluwuluwa, M. R. (2005). "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)". *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*. Vol. 21. No. 2, hh. 262-285.
- Niftrik, G. C. van & Boland, B.J. (2000). *"Dogmatika Masa Kini"*. Jakarta: PT BPK.
- Putra, A., et al. (2023). "Memahami Secara Teologis Politik Dalam Gereja". *Saint Paul's Review*. Vol 3. No. 1, hh. 78-92.

- Rantung, D. A. (2017). "Pendidikan Agama Kristen Dan Politik dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk Di Indonesia". *Shanan: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*. Vol. 1. No. 2, hh. 58-73.
- (2018). "TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja di Tengah Menguatnya Politik Identitas". *Voic of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*. Vol. 2. No. 1.
- Simamora, A. B. (2018). "Politik Menurut Alkitab dan Implikasinya Bagi Peran Gereja Dalam Pusaran Politik di Indonesia". *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah dan Musik Agama*. Vol. 2. No. 1, hh. 1-15.
- Situmorang, J. T. H. (2014). *"Sejearah Gereja Umum"*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Sholikin, A. (2018). *"Hand Out Teori-Teori Politik"*. Lamongan: UIDU. Akses Online: <https://osf.io/preprints/osf/mveb6>, (Akses, 8 July 2024).
- Tambunan, D. (2021). *"Bolehkah Gereja Berpolitik?"*. Jakarta: Binus University. Akses Online: <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/bolehkah-gereja-berpolitik/>, (Akses 23 Juni 2024).
- Wellem, F. D. (2006). *"Kamus Sejarah Gereja"*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.